

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/4csh5n93>

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SRIKANDI

Abduh Fawwaz Irsyad Utoyo¹, Renny Candradewi Puspitarini², Mastina Maksin³, Nuril Hidayati⁴
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga ^{1,2,3}, Fakultas Sastra dan
Filsafat ⁴

fawwaz.utoyo@student.upm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI dalam meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini diarahkan pada penerapan aplikasi SRIKANDI sebagai bentuk digitalisasi administrasi pemerintahan dalam mendukung efektivitas pelayanan publik, khususnya pada proses pembinaan dan pengawasan internal pemerintah daerah. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri atas pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI di Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pelaksanaan tugas organisasi secara lebih efektif dan efisien. Penggunaan aplikasi SRIKANDI mempermudah proses pengelolaan surat menyurat, disposisi, arsip digital, serta koordinasi antar bidang secara lebih cepat dan terintegrasi. Selain itu, penerapan aplikasi ini juga memberikan kemudahan dalam proses administrasi, ketepatan pelayanan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan karena proses kerja menjadi lebih tertata, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diakses oleh pegawai yang berkepentingan. Faktor pendukung implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI di Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo meliputi adanya komitmen pimpinan, sumber daya manusia yang mendukung, serta sarana prasarana yang memadai dalam menunjang keberlangsungan sistem digital pemerintahan. Dengan demikian, aplikasi SRIKANDI berperan penting dalam mendukung transformasi digital pelayanan administrasi pemerintah daerah.

Keywords: Implementasi Kebijakan, SRIKANDI, Pembinaan, Pengawasan, Inspektorat Daerah.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital mendorong pemerintah untuk terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk inovasi tersebut

diwujudkan melalui penerapan Electronic Government atau E-Government. E-Government merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui penerapan E-Government, pemerintah tidak hanya berfokus pada pelayanan yang cepat dan mudah, tetapi juga pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari, mengingat tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin modern, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah Indonesia mengintegrasikan berbagai layanan berbasis digital, termasuk aplikasi umum yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu aplikasi umum yang menjadi tonggak penting dalam bidang kearsipan adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). SRIKANDI merupakan aplikasi resmi yang dikembangkan oleh pemerintah melalui kerja sama antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Dalam Negeri. Kehadiran aplikasi SRIKANDI menjadi salah satu bentuk nyata transformasi digital dalam tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan arsip dan naskah dinas secara elektronik.

Aplikasi SRIKANDI digunakan untuk mengelola arsip dinamis dan naskah dinas secara elektronik mulai dari proses penciptaan, pengiriman, penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan arsip. Dengan adanya aplikasi ini, proses administrasi pemerintahan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dialihkan ke sistem digital yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan SRIKANDI juga mendukung pengurangan penggunaan kertas atau paperless office yang menjadi bagian dari modernisasi birokrasi. Melalui sistem ini, seluruh proses surat menyurat dan pengarsipan dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga memudahkan koordinasi antar perangkat daerah maupun antar instansi pemerintah pusat dan daerah.

Sejak tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menunjukkan komitmennya dalam menerapkan aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari upaya transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Penerapan aplikasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat dan kebijakan presiden dalam mendukung sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik (Probolinggokab, 2023). Implementasi aplikasi SRIKANDI telah diterapkan di berbagai instansi pemerintah, termasuk pada Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat memiliki tugas penting dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrasi yang tertib dan sistem pengelolaan arsip yang baik menjadi faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan.

Di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo, seluruh naskah dinas seperti surat dinas perangkat daerah, surat perintah tugas, nota dinas, serta berbagai bentuk naskah dinas lainnya telah menggunakan aplikasi SRIKANDI. Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi antarpegawai, menciptakan administrasi yang lebih tertib, serta membantu auditor agar dapat lebih fokus pada pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan. Seluruh pejabat struktural maupun pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat telah memiliki akun SRIKANDI sebagai sarana dalam mendukung pelaksanaan administrasi secara elektronik. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses disposisi surat dapat

dilakukan secara cepat, dokumen dapat dilacak dengan mudah, serta pengarsipan menjadi lebih sistematis dan aman.

Penerapan aplikasi SRIKANDI di Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu dan efektivitas kerja. Sebelumnya, proses distribusi surat dan dokumen dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu lebih lama karena harus dicetak dan disampaikan secara langsung. Namun setelah menggunakan aplikasi SRIKANDI, surat dapat dikirim dan diterima secara elektronik sehingga mempercepat proses koordinasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, dokumen yang tersimpan dalam sistem dapat diakses kembali dengan mudah ketika dibutuhkan, sehingga meminimalisasi risiko kehilangan arsip penting.

Meskipun demikian, implementasi aplikasi SRIKANDI dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama berasal dari aspek sumber daya manusia. Masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami penggunaan aplikasi SRIKANDI, baik karena keterbatasan kemampuan teknologi informasi maupun minimnya pelatihan yang mendukung. Perbedaan tingkat literasi digital antarpegawai menyebabkan proses adaptasi terhadap sistem elektronik tidak berjalan secara merata. Pegawai yang terbiasa menggunakan sistem manual cenderung memerlukan waktu lebih lama untuk memahami mekanisme penggunaan aplikasi SRIKANDI.

Selain faktor sumber daya manusia, kendala lain juga muncul dari aspek infrastruktur teknologi. Tidak semua perangkat komputer maupun jaringan internet yang tersedia mampu mendukung penggunaan aplikasi SRIKANDI secara optimal. Dalam beberapa kondisi, jaringan internet yang tidak stabil dapat menghambat proses pengiriman surat maupun akses terhadap dokumen digital. Permasalahan server yang lambat juga terkadang menjadi hambatan dalam penggunaan aplikasi. Padahal, keberhasilan implementasi E-Government sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang baik, pemanfaatan aplikasi digital tidak dapat berjalan secara maksimal.

Kendala berikutnya berasal dari budaya kerja birokrasi yang masih terbiasa menggunakan sistem manual. Sebagian pegawai masih merasa lebih nyaman menggunakan dokumen fisik dibandingkan dokumen elektronik. Perubahan dari sistem manual menuju sistem digital memerlukan proses adaptasi serta komitmen bersama dari seluruh pegawai. Dalam birokrasi pemerintahan, perubahan budaya kerja sering kali menjadi tantangan tersendiri karena berkaitan dengan kebiasaan yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi, pendampingan, serta penguatan komitmen organisasi agar implementasi aplikasi SRIKANDI dapat berjalan dengan optimal.

Penerapan E-Government melalui aplikasi SRIKANDI juga didukung oleh landasan yuridis yang kuat. Salah satu dasar hukum utama adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Selain itu, penerapan aplikasi SRIKANDI juga sejalan dengan Keputusan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam penelitian ini, implementasi aplikasi SRIKANDI dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi,

dan politik. Teori ini relevan digunakan untuk menganalisis implementasi aplikasi SRIKANDI karena dapat membantu melihat sejauh mana kebijakan penerapan sistem digital dapat dilaksanakan secara efektif di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Variabel pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan dapat dilihat dari tujuan penerapan aplikasi SRIKANDI yang diarahkan untuk menciptakan pengelolaan arsip dan administrasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Standar penggunaan aplikasi telah ditetapkan secara nasional sehingga seluruh instansi pemerintah memiliki pedoman yang sama dalam pelaksanaannya. Variabel kedua yaitu sumber daya berkaitan dengan kesiapan pegawai, kemampuan teknologi informasi, serta dukungan infrastruktur yang tersedia.

Dalam hal ini, keterbatasan kemampuan pegawai dan sarana teknologi menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan. Variabel komunikasi antarorganisasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi aplikasi SRIKANDI. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait sangat diperlukan agar pelaksanaan aplikasi berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, komunikasi internal di lingkungan Inspektorat juga mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan secara berkala dapat membantu meningkatkan pemahaman pegawai terhadap penggunaan aplikasi. Karakteristik agen pelaksana berkaitan dengan kemampuan dan komitmen aparatur dalam menjalankan kebijakan.

Dalam implementasi SRIKANDI, aparatur yang memiliki kemampuan teknologi informasi yang baik akan lebih mudah beradaptasi dengan sistem digital. Sebaliknya, pegawai yang kurang memahami teknologi memerlukan pendampingan lebih lanjut. Disposisi atau sikap pelaksana juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Sikap positif dan kemauan untuk menerima perubahan akan mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI.

Selain landasan teoretis, penelitian ini juga didukung oleh landasan empiris dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Sitinjak, Suherdi dan Eryanto pada tahun 2025 dengan judul “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Instansi X” menunjukkan bahwa aplikasi SRIKANDI memberikan manfaat dan kemudahan dalam pengelolaan surat serta arsip yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama terdapat jaringan internet. Namun penelitian tersebut juga menemukan beberapa kendala seperti server yang lambat, keterampilan pegawai yang belum merata, dan potensi kebocoran data.

Selanjutnya, penelitian oleh Sonia Asa dan Rembu tahun 2024 dengan judul “Manajemen Informasi Administrasi dan Kearsipan Menggunakan Aplikasi SRIKANDI dalam Pelayanan Publik di Setjen DPR RI” menunjukkan bahwa aplikasi SRIKANDI memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi pelayanan publik. Efisiensi terlihat dari penghematan waktu dalam memproses dokumen, sedangkan aksesibilitas terlihat dari kemudahan mengakses informasi publik secara digital. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi memerlukan kontribusi seluruh pengguna dalam mendukung penggunaan sistem.

Kemudian penelitian oleh Mahmudah dan Utami tahun 2025 dengan judul “Pengelolaan Arsip Dinamis Melalui Aplikasi SRIKANDI pada Kantor Kecamatan Widang Kabupaten Tuban” menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI belum berjalan optimal pada beberapa tahapan pengelolaan arsip. Masih terdapat surat yang dibuat secara manual akibat keterbatasan pemahaman pegawai dan kurangnya dukungan pimpinan. Selain itu, penggunaan arsip secara elektronik belum sepenuhnya diterapkan karena pegawai masih melakukan koordinasi secara nonformal sehingga instruksi tidak tercatat dengan baik.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar

penelitian membahas implementasi aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dan pelayanan publik secara umum. Namun penelitian mengenai implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI dalam meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan pada lembaga pengawasan internal pemerintah daerah, khususnya di Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo, masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena fokus pada implementasi aplikasi SRIKANDI dalam mendukung tugas pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Rumusan masalah ini penting dikaji untuk mengetahui sejauh mana aplikasi SRIKANDI telah diterapkan dalam mendukung pelayanan administrasi, pembinaan, dan pengawasan di lingkungan Inspektorat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo serta sejauh mana aplikasi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan sistem digital dalam mendukung tata kelola administrasi pemerintahan yang lebih baik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah kajian mengenai implementasi E-Government khususnya dalam bidang kearsipan dinamis dan administrasi pemerintahan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo, dalam mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah lainnya dalam mengembangkan implementasi aplikasi SRIKANDI guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara sistematis mengenai implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI dalam meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap proses implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam penerapan aplikasi SRIKANDI.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada suatu objek tertentu secara mendalam, yaitu implementasi aplikasi SRIKANDI pada Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai kondisi nyata di lapangan terkait penerapan aplikasi SRIKANDI sebagai bentuk implementasi E-Government dalam mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut telah menerapkan aplikasi SRIKANDI dalam kegiatan administrasi dan pengelolaan arsip dinamis.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2026 pada saat jam kerja. Penelitian dilakukan secara langsung di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penentuan waktu penelitian pada jam kerja dilakukan agar peneliti dapat mengamati secara langsung proses penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam kegiatan administrasi sehari-hari serta memperoleh data yang lebih akurat dari informan penelitian.

Subjek penelitian dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri atas pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan yang dipilih merupakan pegawai yang terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI, baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional. Subjek penelitian terdiri dari inspektur, sekretaris, para inspektur pembantu bidang, dan perwakilan pengawas baik auditor maupun pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pemilihan informan tersebut dilakukan karena mereka dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait implementasi aplikasi SRIKANDI dalam mendukung kegiatan administrasi, pembinaan, dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri atas enam indikator. Indikator pertama yaitu standar dan tujuan kebijakan, yang berkaitan dengan kejelasan tujuan implementasi aplikasi SRIKANDI serta kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kedua yaitu sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, kemampuan pegawai, sarana, dan prasarana pendukung implementasi aplikasi SRIKANDI. Indikator ketiga yaitu hubungan antar organisasi, yang berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi antarpegawai maupun antarinstansi dalam mendukung implementasi aplikasi. Indikator keempat yaitu karakteristik pelaksana, yang berkaitan dengan kemampuan dan kesiapan aparatur dalam menjalankan aplikasi SRIKANDI. Indikator kelima yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan di lingkungan organisasi. Indikator keenam yaitu disposisi implementor, yang berkaitan dengan sikap, komitmen, dan dukungan pegawai terhadap implementasi aplikasi SRIKANDI.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan secara langsung dalam proses pengumpulan data, pengamatan, serta analisis data di lapangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara sebagai alat bantu untuk memperoleh informasi dari informan secara terarah sesuai fokus penelitian. Pedoman observasi digunakan untuk mengamati kondisi lapangan dan proses penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Peneliti juga menggunakan alat bantu lain seperti alat tulis, telepon genggam, dan dokumentasi untuk mendukung proses pengumpulan data agar berjalan lebih efektif dan sistematis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai implementasi aplikasi SRIKANDI, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pelayanan pembinaan dan pengawasan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam kegiatan administrasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti surat dinas, arsip elektronik, foto kegiatan, dan data lain yang berkaitan dengan implementasi aplikasi SRIKANDI.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan

triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari berbagai informan penelitian yang terdiri atas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu (Irban), Auditor, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Melalui triangulasi sumber, peneliti dapat mengetahui tingkat kesesuaian dan konsistensi informasi yang diberikan oleh masing-masing informan mengenai implementasi aplikasi SRIKANDI dalam mendukung kegiatan administrasi, pembinaan, dan pengawasan. Selanjutnya, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara diverifikasi dengan hasil observasi lapangan serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi SRIKANDI, seperti surat dinas elektronik, arsip digital, laporan kegiatan, dan dokumen lainnya. Penggunaan triangulasi sumber dan triangulasi teknik bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, validitas, dan keakuratan data penelitian sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu koleksi data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap koleksi data dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian. Selanjutnya, tahap reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar data lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang valid mengenai implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI dalam meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo.

3. TINJAUAN LITERATUR

Kebijakan publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks administrasi publik, kebijakan publik menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Permana, dkk (2025), kebijakan publik dapat diartikan sebagai bentuk keputusan dan tindakan yang disusun oleh pemerintah dalam rangka menangani berbagai persoalan masyarakat serta mewujudkan tujuan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kebijakan publik tidak hanya berupa peraturan, tetapi juga mencakup pelaksanaan program dan langkah strategis pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki cakupan yang luas karena berkaitan dengan seluruh aktivitas pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik.

Frank Fischer dan Gerald J. Miller (2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dibuat pemerintah untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat melalui proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik tidak berhenti pada tahap perumusan saja, tetapi juga menekankan pentingnya implementasi dan evaluasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara

optimal.

Kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian tindakan atau arah yang dirancang oleh individu maupun kelompok pemerintah dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan hambatan yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan menjadi fokus utama karena berkaitan dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai bentuk implementasi E-Government di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik karena menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila implementasinya tidak berjalan dengan efektif. Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Menurut Meter dan Horn dalam Addawiyah, dkk (2025), implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel penting yang saling berkaitan satu sama lain.

Van Meter dan Van Horn dalam Kristian (2022) menjelaskan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Indikator pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan terukur agar dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan. Ketidakjelasan standar dan tujuan kebijakan dapat menimbulkan perbedaan interpretasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan.

Indikator kedua yaitu sumber daya. Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan kebijakan. Sedangkan sumber daya non-manusia meliputi sarana, prasarana, teknologi, dan anggaran yang mendukung implementasi kebijakan. Dalam implementasi aplikasi SRIKANDI, sumber daya manusia dan teknologi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan penerapan sistem digital di lingkungan pemerintahan.

Indikator ketiga yaitu hubungan antar organisasi. Implementasi kebijakan membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar organisasi atau instansi terkait. Kerjasama antarinstansi diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penerapan aplikasi SRIKANDI, koordinasi antarpegawai dan antarinstansi sangat penting untuk mendukung pengelolaan administrasi dan arsip secara terintegrasi.

Indikator keempat yaitu karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma organisasi, serta pola hubungan dalam birokrasi yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Organisasi yang memiliki struktur birokrasi yang jelas dan budaya kerja yang mendukung akan lebih mudah dalam melaksanakan kebijakan dibandingkan organisasi yang belum siap menghadapi perubahan.

Indikator kelima yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Faktor lingkungan seperti kondisi sosial masyarakat, dukungan ekonomi, serta kondisi politik dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Dukungan lingkungan yang kondusif akan membantu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, kondisi lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

Indikator keenam yaitu disposisi implementor. Disposisi implementor berkaitan dengan sikap, pemahaman, dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang diterapkan. Apabila pelaksana memiliki pemahaman dan dukungan yang baik terhadap kebijakan, maka implementasi kebijakan akan berjalan lebih optimal. Sebaliknya, apabila pelaksana kurang memahami atau tidak mendukung kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan akan mengalami hambatan. Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Melalui teori ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana penerapan aplikasi SRIKANDI dilaksanakan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Selain teori implementasi kebijakan, penelitian ini juga menggunakan teori inovasi kebijakan sebagai teori pendukung. Inovasi kebijakan diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan teknologi informasi. Pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital.

Inovasi dalam sektor publik tidak hanya berkaitan dengan penciptaan program baru, tetapi juga perubahan sistem kerja dan tata kelola pemerintahan agar lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Penerapan E-Government diwujudkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Melalui SPBE, pemerintah mengintegrasikan berbagai layanan berbasis elektronik, termasuk aplikasi umum yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pusat maupun daerah. Salah satu aplikasi umum yang menjadi tonggak penting dalam bidang kearsipan adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Dalam konteks penelitian ini, penerapan aplikasi SRIKANDI merupakan salah satu bentuk inovasi kebijakan dalam bidang administrasi pemerintahan dan kearsipan digital. Aplikasi SRIKANDI menjadi bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi pemerintahan.

Melalui aplikasi ini, proses pengelolaan surat dan arsip dapat dilakukan secara elektronik sehingga mempermudah koordinasi, mempercepat pelayanan administrasi, dan meningkatkan efisiensi kerja aparatur pemerintah. E-Government merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan sistem elektronik dan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan interaktif. Pada dasarnya, E-Government bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, maupun antarinstansi melalui penggunaan teknologi digital dalam proses pelayanan dan administrasi pemerintahan (Napitupulu, dkk, 2020).

Penelitian mengenai implementasi aplikasi SRIKANDI telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan oleh Aprillio Egy Arianto (2023) dengan judul “Pengaruh Penggunaan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Terhadap Efisiensi dan Profesionalisme Kerja di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SRIKANDI memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi kerja pegawai ASN di instansi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi mampu meningkatkan efektivitas kerja pegawai.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Faizatur Rahmah dan Meirinawati (2023) mengenai penerapan E-Government melalui aplikasi SRIKANDI di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi telah berjalan dengan baik dari aspek kepemimpinan,



Gambar 1: Alur Penggunaan SRIKANDI

SOP, manajemen proyek, dan finansial. Namun, infrastruktur teknologi dan kemampuan teknologi pegawai masih menjadi kendala dalam implementasi aplikasi. Selanjutnya, penelitian oleh Yulia Nurul Aini (2023) mengenai pengelolaan arsip berbasis digital melalui aplikasi SRIKANDI di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan bahwa inovasi dalam bidang kearsipan telah berjalan dengan baik. Akan tetapi, penelitian tersebut menemukan beberapa hambatan seperti jaringan internet yang kurang stabil dan kurangnya dukungan pimpinan dalam implementasi aplikasi.

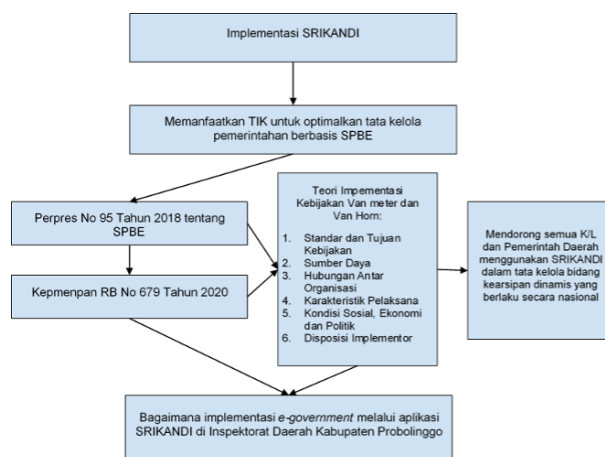
Penelitian lain dilakukan oleh Risa Fatima Kartiana dan Sri Indrahti (2024) mengenai pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dinamis di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SRIKANDI mampu mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyediaan arsip yang terpercaya. Selain itu, penelitian oleh Muhamad Suepa (2024) mengenai implementasi aplikasi SRIKANDI pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa aplikasi SRIKANDI telah mampu mendukung proses pengelolaan arsip meskipun belum optimal dalam tahap pemusnahan arsip. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan aplikasi SRIKANDI secara umum telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas implementasi aplikasi SRIKANDI dari aspek pelayanan publik, transformasi digital, dan pengelolaan arsip secara umum. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti efektivitas aplikasi dalam mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, penelitian mengenai implementasi aplikasi SRIKANDI pada lembaga pengawasan internal pemerintah daerah masih belum banyak dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena fokus pada implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai lembaga penunjang pelayanan publik. Inspektorat memiliki peran penting dalam membantu kepala daerah

melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menjadi penting karena implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan Inspektorat tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai implementasi E-Government dalam mendukung efektivitas pelayanan pembinaan dan pengawasan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI dipengaruhi oleh faktor-faktor implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi politik, serta disposisi implementor. Keenam indikator tersebut mempengaruhi keberhasilan penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Penerapan aplikasi SRIKANDI diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi, mempercepat pengelolaan arsip dan surat dinas, meningkatkan koordinasi antarpegawai, serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara lebih efektif dan efisien.



Gambar 2: Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini berargumentasi bahwa implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo telah membantu meningkatkan efektivitas pelayanan pembinaan dan pengawasan melalui pengelolaan administrasi dan arsip secara digital. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan budaya kerja birokrasi yang masih terbiasa menggunakan sistem manual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI dalam meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Dalam implementasi kebijakan ada enam yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi implementor.

Pada indikator standar dan tujuan kebijakan, pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo memahami mengenai tujuan dari penerapan SRIKANDI yakni sebagai instrumen pendukung tata kelola administrasi pemerintahan yang lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan persuratan dan kearsipan berbasis elektronik. Pemahaman tersebut juga mencakup aspek regulasi, di mana penggunaan SRIKANDI telah diatur melalui pedoman dan ketentuan tertulis, baik yang berlaku secara nasional maupun yang ditindaklanjuti dalam kebijakan internal pemerintah daerah.

Selanjutnya yakni indikator sumber daya. Mengenai sumber daya manusia dan sumber daya non manusia sudah tergolong sangat memadai. Kualitas sumber daya manusia mencakup mengenai keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan juga kompetensi. Dalam segi kuantitas yakni mengenai jumlah dari sumber daya manusia yang tersedia. Jumlah pegawai yang ada sudah cukup memadai. Semua pegawai semua pegawai dengan jabatan fungsional dan jabatan struktural memiliki akun untuk menggunakan SRIKANDI. Selain itu terdapat PIC (people in charge), PIC ini ditunjuk untuk melakukan sosialisasi dan memastikan bahwa SRIKANDI berjalan dengan baik. Sumber daya non manusia yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo sangat memadai dengan adanya Wi-Fi yang dapat digunakan di seluruh area kantor dan laptop yang diberikan kepada seluruh pegawai. Dua hal tersebut mampu memberikan dukungan kepada pegawai agar lebih mudah dan cepat dalam melakukan pekerjaannya.

Indikator hubungan antar organisasi, mengenai indikator ini cukup terlaksana dengan baik. Hubungan antar organisasi yakni dengan DISKOMINFO dan Tim SRIKANDI sangat baik. Dukungannya berupa pendampingan teknis dari penggunaan aplikasi, dukungan jaringan, hingga membantu secara responsif apabila ada kendala teknis di lapangan. Hubungan internal antar bidang sudah cukup baik yakni saling berbagi informasi serta membantu apabila membutuhkan bantuan lainnya.

Selanjutnya yakni karakteristik pelaksana, komitmen pimpinan dalam mendukung penggunaan Aplikasi SRIKANDI. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mendorong seluruh pegawai untuk menggunakan aplikasi secara konsisten dalam kegiatan kedinasan serta membuka ruang koordinasi apabila masih terdapat kendala dalam penerapannya. penerapan Aplikasi SRIKANDI dinilai mampu mempermudah pola komunikasi antara pimpinan dan bawahan, khususnya dalam proses penyampaian disposisi dan tindak lanjut administrasi.

Indikator Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yakni pimpinan daerah Kabupaten Probolinggo memberikan dukungan penuh dalam penggunaan SRIKANDI bahkan dalam pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya himbauan agar seluruh pegawai menggunakan aplikasi SRIKANDI. Dukungan ekonomi yang diberikan yakni berupa fasilitas yang memadai berupa laptop yang diberikan kepada seluruh pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dan jaringan Wi-Fi yang memadai di lingkungan kantor untuk menunjang pekerjaan agar lebih cepat dan tepat. Serta dukungan politik yakni komitmen dari pimpinan yang memastikan bahwa implementasi SRIKANDI ini berjalan secara optimal dan mampu terlaksana dengan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan.

Disposisi implementor, kemudahan dalam menerima arahan dan disposisi pimpinan, sehingga pelaksanaan tugas dapat dipersiapkan dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat. Pada tahap awal implementasi SRIKANDI masih terdapat beberapa kendala dan waktu untuk beradaptasi dari sistem manual ke digital. Untuk para pegawai, sebagian besar sudah menggunakan SRIKANDI dalam pelayanan pembinaan dan pengawasan seperti pembuatan surat tugas, laporan, undangan, dan naskah dinas lainnya

Gambar di atas menunjukkan perbandingan implementasi kegiatan administrasi dan pelayanan



Gambar 3: Perbandingan Implementasi Menggunakan Aplikasi SRIKANDI dan Tanpa Aplikasi

pembinaan serta pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi SRIKANDI berdasarkan enam indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Berdasarkan grafik radar tersebut, terlihat bahwa implementasi dengan menggunakan aplikasi SRIKANDI memperoleh nilai yang lebih tinggi pada seluruh indikator dibandingkan dengan kondisi tanpa aplikasi SRIKANDI. Pada indikator standar dan tujuan kebijakan, penggunaan aplikasi SRIKANDI menunjukkan peningkatan karena tujuan pengelolaan administrasi dan arsip menjadi lebih jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi mampu mendukung pencapaian tujuan kebijakan E-Government secara lebih efektif.

Pada indikator hubungan antar organisasi, aplikasi SRIKANDI memberikan kemudahan dalam koordinasi dan komunikasi antarpegawai maupun antarinstansi melalui sistem persurutan dan pengelolaan dokumen secara elektronik. Kondisi ini berbeda dengan sistem manual yang memerlukan waktu lebih lama dalam proses penyampaian informasi dan dokumen. Indikator sumber daya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penggunaan aplikasi SRIKANDI membantu pegawai dalam mengelola surat dan arsip secara digital sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien serta mengurangi penggunaan kertas dan ruang penyimpanan fisik. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi mendorong peningkatan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas administrasi. Peningkatan paling tinggi terlihat pada indikator karakteristik agen pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pelaksana memiliki kemampuan dan kesiapan yang lebih baik dalam melaksanakan tugas administrasi setelah penggunaan aplikasi SRIKANDI. Sistem yang terintegrasi mempermudah pelaksanaan pekerjaan sehingga kinerja pegawai menjadi lebih efektif dan terstruktur.

Pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik, penggunaan aplikasi SRIKANDI juga memberikan dampak positif. Digitalisasi administrasi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus mengurangi biaya operasional yang sebelumnya digunakan dalam pengelolaan dokumen secara konvensional. Sementara itu, pada indikator disposisi implementor, terlihat adanya peningkatan dukungan dan komitmen pegawai terhadap penerapan aplikasi SRIKANDI. Meskipun pada awal implementasi terdapat proses adaptasi terhadap sistem baru, sebagian besar pegawai menunjukkan sikap positif karena aplikasi tersebut mampu mempermudah pelaksanaan

pekerjaan sehari-hari. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas administrasi, pembinaan, dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya capaian pada seluruh indikator implementasi kebijakan dibandingkan dengan kondisi sebelum penggunaan aplikasi SRIKANDI.

4.2. Pembahasan

Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Implementasi E-Government Melalui Aplikasi SRIKANDI Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Dan Pengawasan (Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo). Mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Van Horn dan Van Meter, terdapat enam indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi implementor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka pembahasannya sebagai berikut.

Dalam mewujudkan keberhasilan pada pelaksanaan implementasi kebijakan, maka terdapat beberapa indikator dalam pelaksanaannya sebagaimana pada teori yang disampaikan oleh Van Horn dan Van Meter.

4.2.1 Standar dan Tujuan Kebijakan

Selain menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI telah mengacu pada pedoman ANRI dan kebijakan pemerintah pusat, temuan ini mengindikasikan bahwa kejelasan standar kebijakan menjadi faktor penting dalam meminimalkan perbedaan pemahaman antarpegawai. Menurut Van Meter dan Van Horn, standar dan sasaran kebijakan yang jelas akan memudahkan implementor menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan operasional. Hal tersebut terlihat dari keseragaman penggunaan tata naskah dinas elektronik di Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan pedoman saja belum menjamin implementasi berjalan optimal. Standar kebijakan tetap memerlukan sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi secara berkala agar seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama terhadap prosedur penggunaan aplikasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmah dan Meirinawati (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi SRIKANDI dipengaruhi oleh kejelasan regulasi yang diikuti dengan pembinaan kepada pengguna.

4.2.2 Kebijakan

Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo telah memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan transformasi digital. Pegawai pada umumnya mampu beradaptasi dengan penggunaan aplikasi, sedangkan dukungan fasilitas berupa laptop dan jaringan internet memperlancar operasional. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa faktor usia masih memengaruhi kemampuan sebagian pegawai dalam mengoperasikan aplikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada jumlah sumber daya, tetapi juga pada pemerataan kompetensi digital.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan agar tidak terjadi kesenjangan kemampuan antarpegawai. Temuan ini memperkuat pendapat Van Meter

dan Van Horn bahwa kualitas sumber daya merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah dan Utami pada tahun 2025 yang menyatakan bahwa sumber daya dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan.

4.2.3 Hubungan antar organisasi

Hubungan yang baik antara Inspektorat, DISKOMINFO, dan Tim SRIKANDI menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan oleh satu organisasi secara mandiri. Koordinasi yang terjalin mampu mempercepat penyelesaian kendala teknis maupun administratif sehingga pelayanan tetap berjalan secara efektif. Namun demikian, ketergantungan terhadap instansi pendukung juga menunjukkan bahwa keberlanjutan implementasi memerlukan mekanisme koordinasi yang konsisten. Apabila komunikasi antarinstansi tidak berjalan optimal, maka penyelesaian masalah teknis dapat terhambat dan berdampak pada efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, hubungan antarorganisasi tidak hanya berfungsi sebagai media koordinasi, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung transformasi digital. Ini sebagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh Sonia Asa dan Rembu tahun 2024, pada penelitiannya mengatakan bahwa harus adanya dukungan dari segala aspek sehingga dalam pelaksanaannya lebih optimal.

4.2.4 Karakteristik pelaksana

Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pelaksana di Inspektorat mendukung implementasi SRIKANDI. Komitmen pimpinan, kepatuhan terhadap prosedur, dan pola komunikasi yang lebih sistematis memperlihatkan adanya perubahan budaya kerja menuju administrasi digital. SRIKANDI tidak hanya berfungsi sebagai media persuratan elektronik, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian administrasi karena setiap disposisi dan tindak lanjut terdokumentasi secara sistematis. Meskipun demikian, perubahan budaya organisasi masih membutuhkan proses adaptasi, terutama bagi pegawai yang telah lama terbiasa dengan administrasi manual. Dengan demikian, implementasi aplikasi tidak hanya menuntut kesiapan teknologi, tetapi juga perubahan perilaku organisasi menuju budaya kerja digital. Sebagaimana pada penelitian Mahmudah dan Utami tahun 2025, dukungan pimpinan sangat berpengaruh dan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan.

4.2.5 Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Dukungan lingkungan organisasi menjadi faktor yang memperkuat keberhasilan implementasi SRIKANDI. Komitmen pimpinan, penyediaan anggaran untuk sarana pendukung, serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung digitalisasi administrasi menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi E-Government tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, tetapi juga oleh dukungan lingkungan eksternal. Namun demikian, keberhasilan tersebut perlu diimbangi dengan evaluasi terhadap keberlanjutan penyediaan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar implementasi tetap berjalan optimal dalam jangka panjang. Dengan kata lain, dukungan lingkungan harus bersifat berkelanjutan, bukan hanya pada tahap awal penerapan aplikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Sonia Asa dan Rembu tahun 2024, kondisi lingkungan sekitar dari sosial, ekonomi dan politik memiliki dampak yang jelas. Dengan adanya kondisi yang kondusif dan

memberikan dukungan penuh akan mempermudah pelaksanaannya.

4.2.6 Disposisi implementor

Sikap positif pegawai terhadap penggunaan SRIKANDI menjadi salah satu faktor yang mempercepat implementasi kebijakan. Kemauan pegawai untuk menggunakan aplikasi menunjukkan adanya penerimaan terhadap perubahan sistem kerja dari manual menuju digital. Kondisi ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menegaskan bahwa disposisi implementor sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat penerimaan belum sepenuhnya merata karena masih terdapat pegawai yang memerlukan pendampingan dalam penggunaan aplikasi. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari tingkat penggunaan aplikasi, tetapi juga dari konsistensi pemanfaatannya dalam seluruh proses administrasi. Dengan demikian, pembinaan, pendampingan, dan evaluasi berkala tetap diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan SRIKANDI telah menjadi bagian dari budaya kerja organisasi, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitinjak, Suherdi dan Eryanto pada tahun 2025, yang mengatakan bahwa dalam pengimplementasiannya sikap pegawai dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan akan tetapi tidak hanya ditentukan oleh sikap pegawai namun konsistensi dalam penggunaannya sehingga kebijakan tidak hanya diterapkan pada awal saja, akan tetapi digunakan sesuai kebutuhannya.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI di Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo telah memenuhi enam indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa keberhasilan implementasi masih menghadapi tantangan berupa perbedaan tingkat literasi digital pegawai dan perlunya evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi juga oleh sinergi antara regulasi, sumber daya, komitmen organisasi, koordinasi antarinstansi, serta kesiapan implementor dalam beradaptasi dengan transformasi digital

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI dalam meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SRIKANDI telah berjalan dengan cukup baik dan mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan secara digital. Implementasi aplikasi ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, khususnya dalam pengelolaan surat menyurat, arsip dinamis, serta proses koordinasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Pada aspek standar dan sasaran kebijakan, penerapan SRIKANDI telah memiliki pedoman dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan dari pemerintah pusat. Penggunaan aplikasi ini diarahkan untuk menciptakan administrasi yang lebih tertib, mempercepat proses pelayanan, serta mendukung penerapan sistem kerja berbasis digital dan paperless. Dari sisi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung telah cukup memadai. Pegawai memiliki kemampuan yang cukup baik dalam penggunaan teknologi dan didukung dengan adanya sosialisasi serta pendampingan terkait penggunaan aplikasi SRIKANDI. Selain itu, fasilitas penunjang seperti perangkat kerja dan jaringan internet juga membantu

kelancaran implementasi aplikasi.

Pada indikator hubungan antar organisasi, koordinasi dan komunikasi antarpegawai maupun dengan instansi pendukung telah berjalan dengan baik sehingga mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Karakteristik pelaksana juga menunjukkan adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan maupun pegawai terhadap penerapan aplikasi SRIKANDI. Penggunaan sistem digital membuat proses administrasi menjadi lebih transparan, terdokumentasi, dan mudah diakses ketika dibutuhkan.

Kondisi sosial, ekonomi, dan organisasi turut memberikan dukungan terhadap implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Dukungan pimpinan, kesiapan fasilitas, serta komitmen organisasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, disposisi implementor menunjukkan respons yang positif dari pegawai terhadap penggunaan aplikasi. Pegawai memiliki pemahaman dan kemauan untuk menerapkan aplikasi SRIKANDI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga berdampak pada meningkatnya efektivitas kerja dan tertib administrasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada proses pengumpulan data, khususnya dalam penentuan jadwal wawancara dengan informan penelitian. Penyesuaian waktu antara peneliti dan informan menjadi salah satu kendala karena adanya kesibukan masing-masing pihak. Selain itu, penelitian dilaksanakan bersamaan dengan aktivitas pekerjaan peneliti sehingga proses pengumpulan data memerlukan pengaturan waktu yang lebih fleksibel sesuai kondisi di lapangan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam kajian administrasi publik, khususnya terkait implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI dalam mendukung pelayanan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan teori, pendekatan, maupun indikator lain sehingga dapat menghasilkan kajian yang lebih luas dan mendalam mengenai implementasi aplikasi SRIKANDI maupun transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam menganalisis implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi organisasi, serta disposisi implementor yang saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo untuk terus mengoptimalkan implementasi aplikasi SRIKANDI melalui peningkatan kompetensi pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung, serta evaluasi implementasi secara berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Addawiyah, F. L., & Fadillah, N. (2025). Efektivitas implementasi kebijakan publik dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif: Tinjauan teoritis dan empiris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 27–35. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH>
2. Aini, Y. N. (2023). Pengelolaan arsip berbasis digital melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi

- Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 84–88. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/900>
3. Arianto, A. E. (2023). *Pengaruh penggunaan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) terhadap efisiensi dan profesionalisme kerja di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo* (Skripsi, Universitas Panca Marga). <http://repository.upm.ac.id/id/eprint/4312>
 4. Fathani, A. T., Pribadi, U., Suling, C. F., & Azmi, N. A. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Dlingo, Bantul. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, 10(1), 92–100. <https://doi.org/10.26418/justin.v10i1.44347>
 5. Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2017). *Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods*. CRC Press.
 6. Kartiana, R. F., & Indrahti, S. (2024). Pemanfaatan aplikasi SRIKANDI terhadap pengelolaan arsip dinamis dalam rangka penerapan SPBE di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan BPOM. *Seminar Nasional FKIP UT*, 5(2), 436–447. <https://conference.ut.ac.id/index.php/semnasip/article/view/3060>
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
 8. Kristian, I. (2022). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 23–37. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/6621>
 9. Mahmudah, L. N., & Utami, D. A. (2025). Pengelolaan arsip dinamis melalui aplikasi SRIKANDI pada Kantor Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, 3(2), 253–264. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/44102>
 10. Napitupulu, D., dkk. (2020). *E-government: Implementasi, strategi, dan inovasi*. Yayasan Kita Menulis.
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
 12. Permana, dkk. (2025). Definisi kebijakan publik: Pengertian, unsur-unsur, dan perkembangan. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 453–457. <https://jurnal.padangtekno.web.id/index.php/menulis>
 13. Probolinggokab. (2023). *Wabup Timbul Launching Aplikasi SRIKANDI dan Canangkan GNSTA*. <https://probolinggokab.go.id/wabup-timbul-launching-aplikasi-srikandi-dan-canangkan-gnsta/>
 14. Rahmah, F., & Meirinawati, M. (2023). Penerapan electronic government melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo. *Publika*, 11(3), 2341–2350. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2341-2350>
 15. Sitinjak, T., Suherdi, & Eryanto, H. (2025). Analisis penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Instansi X. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(3), 278–288. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Sosial>
 16. Sonia Asa, E., & Rembu, Y. (2024). Manajemen informasi administrasi dan kearsipan menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam pelayanan publik di Sekretariat Jenderal DPR RI. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 25–38. <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Kajian>

17. Suepa, M. (2024). Pengimplementasian Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang. *Seminar Nasional Ilmu Pemerintahan*, 304–314. <https://conference.ut.ac.id/index.php/semnasip/article/download/3094/1299/8039>